

PERAN STAKEHOLDER DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI KOTA DUMAI

THE ROLE OF STAKEHOLDERS IN FLOOD DISASTER MITIGATION IN DUMAI CITY

Nursila Amanda¹, Dadang Mashur²

^{1,2} Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

E-mail: nursila.amanda0344@student.unri.ac.id¹, dadang.mashur@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak: Kota Dumai merupakan daerah rawan bencana terutama bencana yang termasuk bencana hidrometeorologi seperti banjir. Permasalahan banjir menjadi bencana yang cukup rentan terjadi di Kota Dumai. Banjir yang terjadi di Kota Dumai disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia itu sendiri. Untuk itu sangat diperlukan peran stakeholder yang baik dalam mitigasi bencana banjir di Kota Dumai, agar tingkat risiko bencana banjir dapat diminimalisir yang akan datang. Hal ini tentunya didukung dengan sumber daya manusia yang berkompeten dalam mitigasi bencana banjir di Kota Dumai, dimana sangat dibutuhkan peran setiap stakeholder terkait mulai dari sektor pemerintah, swasta, LSM, akademisi, sekolah dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran stakeholder dalam mitigasi bencana banjir di Kota Dumai serta hambatan peran stakeholder dalam mitigasi bencana banjir di Kota Dumai. Konsep teori yang digunakan peneliti adalah konsep Peran Stakeholder dari Nugroho 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah peran stakeholder dalam mitigasi bencana banjir di Kota Dumai berjalan cukup baik, namun masih terdapat sedikit hambatan yang dialami oleh masing-masing stakeholder dalam menjalankan perannya.

Kata Kunci: Kota Dumai, Bencana Banjir, Mitigasi, Peran stakeholder.

Abstract: Dumai City is a disaster-prone area, particularly vulnerable to hydrometeorological disasters such as floods. Flooding has become a common and significant issue in Dumai City, caused by both natural and human factors. Thus, an effective stakeholder role in flood disaster mitigation in Dumai City is crucial to minimize future disaster risks. This effort requires the support of competent human resources in flood disaster mitigation, emphasizing the active involvement of various stakeholders, including the government, private sector, NGOs, academics, schools, and the community. This study aims to examine the roles of stakeholders in flood disaster mitigation in Dumai City and the obstacles they face in fulfilling these roles. The theoretical framework used in this research is the Stakeholder Role concept by Nugroho (2014). The study employs a qualitative research method with a descriptive approach. The findings indicate that the roles of stakeholders in flood disaster mitigation in Dumai City are generally effective, though some challenges persist for each stakeholder group in carrying out their responsibilities.

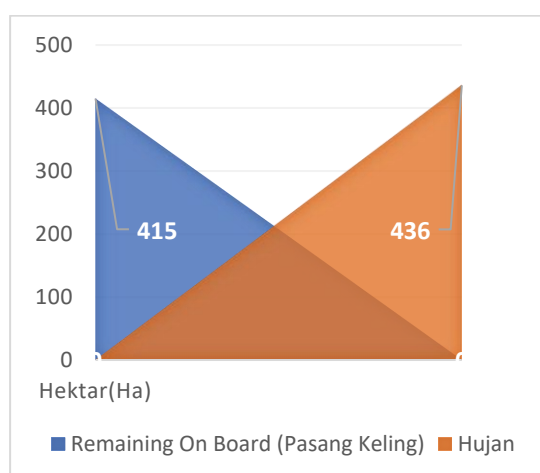
Keywords: Dumai City, Flood Disaster, Mitigation, Stakeholder Role.



PENDAHULUAN

Kota Dumai merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Riau, dimana Kota Dumai terletak pada posisi 01°23'00" – 01°24'23" Lintang Utara, 101°23'37" – 101°28'13" Bujur Timur. Dengan luas wilayah sekitar 1.727,38 Ha serta wilayah perairan seluas 71.393 Ha'. Letak Kota Dumai yang berada di pesisir membuat Kota Dumai menjadi daerah yang rawan terkena bencana banjir. Wilayah Kota Dumai merupakan daerah rawan bencana terutama bencana yang termasuk bencana hidrometeorologi seperti (banjir, ekstrim, gelombang ekstrim, kekeringan, cuaca abrasi, kebakaran hutan dan lahan) dan bencana gempa bumi. Alasan lain mengapa Kota Dumai masih rentan mengalami banjir karena pengaruh air pasang dari sungai-sungai yang ada di dalam Kota Dumai. Permasalahan banjir di Kota Dumai tidak hanya dipengaruhi oleh curah hujan dan pasang keling, tetapi juga diperburuk oleh kapasitas sungai tidak memadai, pembuangan sampah dan sistem drainase yang tidak dikelola dengan baik, banyaknya permukiman di sekitaran sungai dan kedalaman tanah menurun sehingga banjir sering terjadi di Kota Dumai.

Gambar 1. Jumlah Genangan 2021



Sumber: Olahan data peneliti dari Dinas Pekerjaan Umum, 2024.

Berdasarkan tabel di atas terkait mengenai jumlah genangan tersebut, maka dapat diketahui bahwa total luas area yang tergenang pada tahun 2021 mencapai 851 hektar. Genangan ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu Remaining On Board (Pasang Keling) yang mencakup 415 hektar, sedangkan curah hujan menyebabkan genangan seluas 436 hektar. Data ini menunjukkan bahwa hujan memberikan kontribusi lebih besar terhadap genangan dibandingkan dengan pasang keling. Oleh karena itu, upaya mitigasi banjir harus mempertimbangkan pengelolaan air hujan dan sistem drainase yang lebih optimal untuk mengurangi risiko genangan di wilayah terdampak.

Beberapa wilayah di Dumai Kota (Kelurahan Sukajadi, Rimba sekampung), Dumai Timur (Kelurahan Buluh Kasap), Dumai Barat (Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan), dan Dumai Selatan (Kelurahan Bumi Ayu, Kelurahan Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Timah, dan Kelurahan Ratu Sima) sangat rentan terhadap bencana banjir. Banjir biasanya terjadi secara teratur, terutama banjir rob yang sering terjadi di Kota Dumai setiap bulannya dan banjir curah hujan jika musim hujan sering terjadi di penghujung tahun. Banjir di daerah Kota Dumai dapat terjadi sekitar 1-4 kali dalam seminggu dengan ketinggian mencapai 0,3 m hingga 2,5 meter.

Tabel 1. Masyarakat Terdampak Tahun 2021

Kelurahan	Jumlah masyarakat terdampak
Sukajadi	450 Jiwa
Bintan	718 Jiwa
Bumi Ayu	2.623 Jiwa
Bukit Datuk	884 Jiwa
Total	4.675 Jiwa

Sumber: BPBD Kota Dumai, 2024.

Berdasarkan data kelurahan yang terdampak banjir dan jumlah masyarakat yang terdampak Kelurahan Bumi Ayu adalah kelurahan yang jumlah masyarakat terdampak banjir paling banyak. Hal ini karena Kelurahan Bumi Ayu yang berdekatan dengan sungai sehingga saat intensitas hujan tinggi, wilayah ini sangat rentan mengalami luapan air. Proses drainase yang belum optimal turut memperparah situasi, menyebabkan genangan meluas hingga ke pemukiman warga. Selain itu, permukiman padat penduduk yang berada di dataran rendah menjadikan wilayah ini kerap menjadi langganan banjir setiap tahunnya, menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang cukup signifikan bagi masyarakat setempat.

Banjir menyebabkan banyak kerugian, salah satunya adalah membuat daerah yang terdampak banjir menjadi permukiman kumuh dengan infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak. Dengan mempertimbangkan konsekuensi negatif yang dapat ditimbulkan oleh banjir, ini menjadi suatu pengingat bagi pemerintah Kota Dumai untuk mempersiapkan sumber daya yang cukup untuk menghadapi dan menangani banjir dengan segera. Fakta lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Dumai tidak dapat menangani banjir secara mandiri. Oleh karena itu, stakeholder harus berpartisipasi dalam memitigasi banjir untuk mencapai hasil terbaik.

Gambar 2 Daerah Terdampak Banjir Bumi Ayu 2021



Sumber: Dokumentasi dari Warga Terdampak, 2024.

Mitigasi sangat penting karena mitigasi dapat meminimalkan risiko

dampak bencana banjir. Untuk mengurangi korban jiwa, kehilangan harta benda, dan dampak lainnya dari bencana banjir, peran berbagai stakeholder mampu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam menangani bencana banjir. Penyelenggaraan mitigasi bencana banjir tidak akan berhasil tanpa peran berbagai stakeholder. Menurut Mince dalam Firdausi (2025), secara teori peran merupakan interaksi didalam lingkup sosial yang dapat diartikan sebagai sejumlah aktor yang berperan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam budaya. Peran juga dapat berarti sebagai sebuah pemahaman bersama yang akan membawa kita dalam berperilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun stakeholder yang terlibat dalam mitigasi bencana banjir di Kota Dumai meliputi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai yang memiliki peran utama dalam koordinasi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai lingkungan, dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) berperan dalam perbaikan infrastruktur. Selain itu, Walikota juga memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan strategis untuk mitigasi bencana. Pihak perusahaan berkontribusi melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) serta dukungan teknis lainnya. Tidak hanya peran pemerintah, perusahaan, komunitas lokal seperti LSM, akademisi dan masyarakat juga memiliki peran dalam kegiatan mitigasi. Komunitas ini aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan, pendidikan, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mitigasi banjir. Masyarakat, sebagai pihak yang paling terdampak, juga memiliki kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengikuti program-program mitigasi yang telah dicanangkan.

Mitigasi bencana banjir di Kota Dumai mempunyai kompleksitas tersendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi peran stakeholder dalam mitigasi banjir. Hal ini akan membantu mencerminkan minat dan pemahaman terhadap mitigasi bencana banjir sehingga program dan

kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan tepat. Menurut pembagian tugas tanggung jawab manajemen bencana yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB (Badan Nasional, Penanggulangan Bencana Nasional), lembaga usaha, dan lembaga internasional bertanggung jawab untuk menangani bencana banjir dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana merupakan dasar hukum penting yang mengatur bagaimana pemerintah Indonesia menangani penanggulangan bencana. Tujuan undang-undang ini adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan. *Stakeholder* bertindak sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing *stakeholder* serta berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah bencana secara kolektif. Oleh karena itu, peran dan fungsi masing-masing harus maksimalkan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran stakeholder dalam mitigasi bencana banjir di Kota Dumai dan faktor penghambat peran stakeholder dalam mitigasi bencana banjir di Kota Dumai. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peran Stakeholder dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kota Dumai”

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan judul “Peran Stakeholder dalam Mitigasi Bencana Banjir Kota Dumai” yang mengadopsi pendekatan studi kasus bersifat pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam kontribusi berbagai pihak dalam mitigasi bencana banjir di Kota Dumai. Sugiyono (2021:442) metode penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang meneliti pada obyek yang

alamiah, penelitian diarahkan untuk memahami makna, menemukan hipotesis, dan mengkontruksi fenomena. Dengan metode ini maka akan dianggap mampu menjawab rumusan masalah.

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis terdiri dari 2 data yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian kualitatif penulis menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data pada umumnya yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis model interaktif yang terdiri dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana peran stakeholder dalam mitigasi bencana banjir di Kota Dumai. Adapun teori yang peneliti gunakan adalah teori peran *stakeholder* menurut Nugroho, H.N Zauhar & Suaryadi (2014) dimana pada teori ini menjelaskan bagaimana peran stakeholder berdasarkan klasifikasinya dapat dikelompokkan menjadi lima yaitu : Pembuat Kebijakan (*Policy Creator*), Penyedia (*Facilitator*), Penggerak Utama (*Coordinator*), Pelaksana (*Implementer*), dan Pendukung (*Accelerator*)

Peran Stakeholder dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kota Dumai menurut Nugroho

1. Pembuat Kebijakan (*Policy Creator*)

Pembuat kebijakan adalah stakeholder yang memiliki peran penting dalam menentukan arah suatu kebijakan dan mengambil keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat. Dalam setiap proses perumusan kebijakan, peran pemimpin sangatlah esensial karena mereka bertindak untuk memastikan kebijakan dapat



diimplementasikan secara optimal.

Walikota sebagai kepala daerah, tentunya memiliki peran utama dalam menetapkan kebijakan, termasuk kebijakan untuk mitigasi bencana banjir. Wali Kota memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan kebijakan di tingkat kota dan memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan dengan baik. Wali Kota Dumai memiliki peran pembuat kebijakan dalam mitigasi bencana banjir sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan daerah. Berperan sebagai pembuat kebijakan, Wali Kota bertanggung jawab dalam merumuskan, mengoordinasikan, dan mengimplementasikan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana banjir serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

Salah satu langkah penting yang diambil oleh Wali Kota Dumai dalam upaya mitigasi banjir adalah menetapkan kebijakan dan regulasi yang mengatur tata ruang dan pengelolaan lingkungan. Dengan adanya kebijakan dan regulasi yang jelas, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pembangunan di wilayah rawan banjir dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Dalam penentu kebijakan, Walikota Kota Dumai melakukan musyawarah bersama OPD-OPD terkait dan tokoh masyarakat. Walikota Kota Dumai juga selalu mengutamakan musyawarah dalam proses pengambilan kebijakan. Pemerintah Kota Dumai selalu melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam membuat keputusan agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat serta mendukung kemajuan daerah. Proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati sehingga semua bagian masyarakat merasa terlibat dan mendapatkan manfaat dari kebijakan pemerintah Kota Dumai. Wali Kota Dumai juga memiliki peran dalam mengalokasikan anggaran daerah untuk program mitigasi banjir. Anggaran ini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur mitigasi bencana banjir.

Adapun bentuk konkret dari peran

sebagai pembuat kebijakan tersebut, Walikota Kota Dumai telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait kepengurusan Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai. Keberadaan peraturan ini sangat penting untuk memperjelas struktur dan wewenang BPBD dalam menangani berbagai aspek kebencanaan, termasuk mitigasi banjir. Selain itu, Wali Kota Dumai juga mengeluarkan Peraturan Wali Kota Dumai No. 30 Tahun 2023 Tentang Masterplan Smart City Kota Dumai. Masterplan merupakan sebuah rencana induk pedoman pembangunan dan pengembangan program dan kegiatan. Dumai Smart City merupakan dokumen perencanaan mutisektoral dan terintegrasi yang berisikan panduan pembangunan konsep masa kini dan masa depan Kota Dumai yang berfungsi menetapkan arah kebijakan, regulasi, strategi, tujuan, sasaran, arah prioritas dan target pembangunan menuju Dumai Smart City.

2. Penggerak Utama (*coordinator*)

Koordinator menurut Nugroho dalam Utami, dkk (2023) merupakan sebuah tindakan stakeholders dalam mengkoordinasikan stakeholders lain yang terlibat. Stakeholder yang berperan sebagai koordinator yaitu pihak yang memiliki peran untuk mengkoordinasikan para stakeholder yang terlibat dalam mitigasi bencana banjir di Kota Dumai. Adapun stakeholder yang berperan sebagai coordinator/penggerak utama tentunya mampu berkomunikasi yang baik dengan para stakeholder lain yang terlibat dalam mitigasi bencana banjir di Kota Dumai tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk mengetahui dari peran sebagai koordinator dalam mitigasi bencana banjir di Kota Dumai. Dalam upaya mitigasi bencana banjir di Kota Dumai, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berperan sebagai koordinator utama yang mengoordinasikan berbagai instansi dan

pihak terkait. BPBD bertanggung jawab untuk merencanakan langkah-langkah mitigasi, serta memastikan setiap stakeholder menjalankan perannya dengan baik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai dibentuk untuk menangani bencana secara menyeluruh baik sebelum bencana, saat bencana, maupun setelah bencana. Bencana alam tidak dapat dihindari dan sebagai sesuatu yang tidak dapat dikontrol.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai memiliki tugas dan fungsi yang dengan tingkat tinggi dalam pengurangan risiko bencana. Hal ini ditandai dengan Peraturan Walikota Kota Dumai Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai terdapat pada pasal 8, yakni:

a. Pengoordinasian unsur pelaksana melalui koordinasi dengan perangkat daerah lainnya;

b. Pengoordinasian dengan instansi, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana;

Tidak hanya Badan Penanggulangan Bencana Banjir Kota Dumai, tetapi Walikota Dumai memiliki peran dalam mengoordinasikan upaya mitigasi bencana banjir, khususnya dalam menjalankan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Wali Kota Dumai berperan sebagai koordinator antara Balai Besar Sungai Provinsi dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai sudah semestinya melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang memiliki peran penting dalam penanganan bencana banjir di Kota Dumai. Tentunya stakeholder terkait berupaya mampu saling berbagi informasi dan sumber daya untuk mengoptimalkan kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan. Hal ini tentunya melibatkan koordinasi aktif untuk

menyelaraskan kebijakan mitigasi bencana di tingkat lokal dengan kebijakan nasional, memastikan bahwa mitigasi yang dilakukan di daerah sejalan dengan standar dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Gambar 3. Mengadakan FGD Akhir Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 2024



Sumber: Media Sosial Instagram BPBD Kota Dumai, 2024.

BPBD dan Wali Kota Dumai merupakan stakeholder yang berperan sebagai koordinator. Tentunya peran sebagai koordinator harus mampu melakukan koordinasi yang baik antar stakeholder terkait. Dengan adanya peran penggerak yang aktif dalam koordinasi, maka mitigasi bencana banjir di Kota Dumai dapat berjalan lebih optimal, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Dalam upaya mitigasi bencana banjir, koordinasi antara Wali Kota, BPBD, DLH, dan DPU serta stakeholder lainnya harus ditopang oleh komunikasi yang jelas agar setiap tindakan dapat dilakukan secara sinergis dan tepat sasaran. Menurut Edward III dalam Khoirurrohman (2024), dalam komunikasi terdapat beberapa dimensi penting yang perlu diperhatikan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan suatu program atau kebijakan, yaitu transisi, kejelasan, dan konsistensi.

Dimensi transisi menekankan

pentingnya penyampaian informasi yang bebas dari kesalahpahaman. Informasi tersebut tidak hanya harus diterima oleh pelaksana kebijakan tetapi juga oleh kelompok sasaran dan stakeholder. Dimensi kejelasan memastikan bahwa maksud, tujuan, serta substansi kebijakan disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh pelaksana. Sementara itu, dimensi konsistensi menuntut agar informasi yang diberikan tetap selaras dan tidak berubah-ubah, sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan, baik dalam penyampaian kebijakan kepada masyarakat maupun dalam menerima tanggapan dari pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.

3. Fasilitator/Penyedia (Facilitator)

Fasilitator menurut Nugroho dalam Utami (2023) merupakan peran stakeholders sebagai pihak yang menyediakan dan memenuhi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran. Artinya, dimana Pemerintah harus bertanggungjawab untuk menyediakan dan mencukupi berbagai kebutuhan yang diperlukan, sehingga mitigasi bencana banjir di Kota Dumai dapat berjalan dengan optimal. Fasilitas menjadi salah satu faktor yang penting dalam mitigasi bencana banjir di Kota Dumai. Jika pada penyediaan sarana non-fisik seperti pelatihan kesiapsiagaan bencana, simulasi evakuasi, dan penyediaan peralatan tanggap darurat, maka ini menjadi peran fasilitator oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai. Sarana ini tentunya bertujuan untuk mitigasi dan meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi banjir. Pada sisi lainnya, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Dumai berfokus pada pembangunan prasarana fisik, seperti pembuatan dan pemeliharaan drainase, pembangunan tanggul tanah sungai dan geobag di bantaran Sungai Dumai, serta pemasangan pompa air untuk mengendalikan genangan. Prasarana yang

dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Dumai memiliki dampak jangka panjang dalam mengurangi risiko banjir melalui peningkatan sistem pengelolaan air.

Gambar 4. Pintu Air dan Geobag



Sumber: Hasil Observasi Oleh Peneliti 2024.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Dumai berperan dalam menyediakan sarana yang berkaitan dengan lingkungan, seperti pengangkutan sampah. Sarana ini bertujuan untuk mencegah faktor-faktor penyebab banjir, terutama yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Aspek mitigasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yang menjelaskan bahwa mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana. Upaya tersebut dapat dilaksanakan melalui pembangunan fisik serta peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.

Gambar 5. Armada Pengangkutan Sampah



Sumber: Hasil Observasi Oleh Peneliti, 2024.

Dari perbedaan peran tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan mitigasi

bencana banjir tidak hanya bergantung pada satu stakeholder saja, tetapi memerlukan koordinasi yang baik antara BPBD, DLH, dan DPU. Dengan sinergi yang kuat berbagai stakeholder, penyediaan sarana dan prasarana dapat berjalan lebih optimal untuk meminimalisir dampak banjir di Kota Dumai.

4. Pelaksana (Implementor)

Mitigasi bencana banjir di Kota Dumai melibatkan sejumlah stakeholder sebagai pelaksana (implementor), yang bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Menurut Nugroho dalam Utami (2023), pelaksana merupakan pihak yang mengaplikasikan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi risiko bencana secara nyata. Pada indikator ini, stakeholder pelaksana terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Lingkungan Hidup (UPT Persampahan), kecamatan, kelurahan, dan RT. BPBD Kota Dumai fokus pada sosialisasi, simulasi evakuasi, pemetaan wilayah rawan banjir, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat melalui edukasi dan pelatihan. DPU bertanggung jawab dalam hal teknis infrastruktur seperti pembangunan tanggul, pengerukan sungai, serta pemeliharaan dan pengawasan sistem drainase.

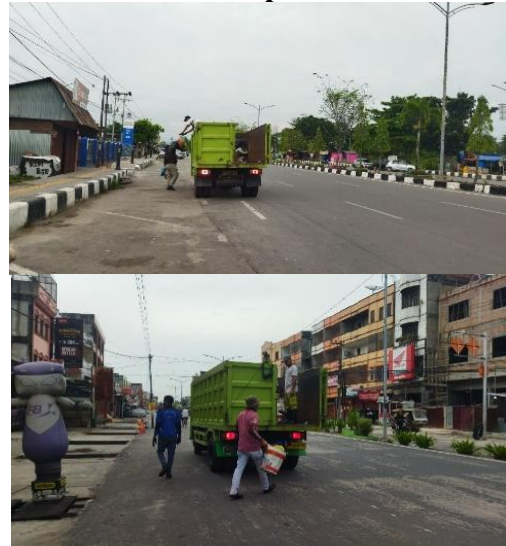
Gambar 6. Normalisasi Saluran Drainase Dock Yard



Sumber: Hasil Observasi Oleh Peneliti UPT Persampahan DLH Kota

Dumai menjalankan pengangkutan dan pembersihan sampah untuk mencegah penyumbatan saluran air.

Gambar 7. Pelaksanaan Pengangkutan Sampah



Sumber: Hasil Observasi oleh Peneliti, 2025.

Kecamatan dan kelurahan memanfaatkan kedekatannya dengan masyarakat untuk mengorganisir gotong royong dan menyosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. RT, sebagai unit paling dekat dengan warga, menjalankan kegiatan bersih-bersih, menyampaikan aspirasi, serta menyebarkan informasi penting terkait banjir kepada masyarakat.

Gambar 8. Gotong Royong Kelurahan Bersama Warga



Sumber: Dokumentasi oleh Kelurahan Pangkalan Sesai, 2024.

Melalui wawancara dan observasi,

diketahui bahwa seluruh stakeholder berperan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing stakeholder. Adanya peran berbagai stakeholder menjadi kunci utama dalam pelaksanaan mitigasi banjir di Kota Dumai. Langkah-langkah ini tentunya mampu meminimalkan risiko dan dampak banjir secara menyeluruh.

5. Peran sebagai Pendukung

Dalam upaya mitigasi bencana banjir di Kota Dumai, berbagai stakeholder berperan sebagai pendukung atau akselerator yang berkontribusi mempercepat pencapaian program mitigasi. Menurut Nugroho dalam Utami dkk. (2023), akselerator adalah pihak yang membantu mempercepat keberhasilan suatu program melalui penyediaan sumber daya, teknologi, pendanaan, dan dukungan kebijakan. Pada indikator ini, peran ini diisi oleh berbagai stakeholder seperti perusahaan swasta, LSM, akademisi, sekolah, dan masyarakat.

PT Kilang Pertamina Unit Dumai misalnya, berpartisipasi dalam normalisasi kanal sebagai bagian dari pencegahan banjir. Dinas Pekerjaan Umum mengakui bahwa kerja sama dengan perusahaan sangat membantu efektivitas program mitigasi. LSM Alam Bahari Hutan Bakau aktif menanam mangrove untuk mengurangi dampak banjir rob dan membangun kesadaran lingkungan bersama komunitas. Sekolah-sekolah turut berperan melalui edukasi dan kegiatan gotong royong bersama siswa, membentuk kesadaran sejak dini tentang pentingnya menjaga lingkungan.

Mahasiswa dari STT dan STIA Dumai mendukung melalui riset, edukasi masyarakat, dan kegiatan penanaman mangrove, menunjukkan peran aktif akademisi dalam penyediaan solusi berbasis ilmu pengetahuan. Masyarakat, sebagai elemen penting dalam mitigasi, terlibat dalam gotong royong bersama, menjaga kebersihan lingkungan, dan tidak membuang sampah sembarangan.

Gambar 9. Penanaman Pohon Bakau di Hutan Bakau Dumai



Sumber: Dokumentasi dari Mahasiswa STT Dumai

Sinergi antara pemerintah, swasta, lembaga pendidikan, LSM, dan masyarakat mencerminkan pendekatan kolaboratif dalam mempercepat mitigasi bencana. Keterlibatan aktif semua pihak ini menunjukkan bahwa peran akselerator sangat penting dalam mengurangi risiko dan dampak banjir di Dumai. Apabila stakeholder menjalankan perannya secara optimal, maka mitigasi banjir akan lebih efektif dan berkelanjutan.

Faktor Penghambat Peran *Stakeholder* dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kota Dumai

1. Konflik Sosial

Banjir yang terjadi secara terus-menerus terjadi di Kota Dumai berpotensi menjadi bencana jika tidak ditangani dengan serius. Berbagai stakeholder seperti Walikota, BPBD, DLH, DPU, LSM, pihak swasta, akademisi, dan masyarakat memiliki peran penting dalam mitigasi banjir. Namun, pelaksanaannya sering menghadapi hambatan, terutama konflik sosial dengan masyarakat. Salah satu contoh konflik adalah penolakan warga terhadap pembangunan atau normalisasi drainase akibat persoalan lahan. Ketidaksepakatan ini menghambat proyek dan menurunkan efektivitas sistem drainase, sehingga memperburuk risiko banjir. Konflik ini menjadi tantangan utama dalam upaya optimalisasi mitigasi banjir oleh Dinas Pekerjaan Umum.

2. Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama bagi stakeholder dalam mitigasi bencana banjir di Kota Dumai. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) menghadapi kendala dalam pembangunan dan normalisasi drainase karena dana yang terbatas, sehingga beberapa program harus ditunda. Hal serupa juga dialami oleh BPBD, yang harus membagi anggaran untuk berbagai jenis bencana, bukan hanya banjir. Akibatnya, pelaksanaan program mitigasi banjir tidak berjalan optimal. Wawancara dengan pihak terkait menunjukkan bahwa peningkatan alokasi anggaran serta efisiensi penggunaannya sangat diperlukan untuk mendukung upaya pencegahan banjir secara maksimal di Kota Dumai.

3. Lemahnya Kemitraan

Kemitraan antara pemerintah, masyarakat, LSM, dan sektor swasta sangat penting dalam mitigasi banjir di Kota Dumai. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa peran LSM Alam Bahari belum dimaksimalkan karena minimnya keterlibatan dari pemerintah, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Kurangnya koordinasi dan komunikasi membuat kontribusi LSM terbatas, meskipun mereka memiliki potensi besar dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Ketiadaan peran berbagai stakeholder akan menghambat efektivitas program mitigasi banjir. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya kolaboratif melalui forum rutin, pembagian peran yang jelas, dan pelibatan aktif semua stakeholder untuk mencapai hasil optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai peran stakeholder dalam mitigasi bencana banjir di Kota Dumai serta hambatan-hambatan yang terjadi pada berbagai peran stakeholder dalam mitigasi bencana banjir di Kota Dumai, maka dalam

bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran stakeholder dalam mitigasi bencana banjir di Kota Dumai mengacu pada lima indikator yaitu stakeholder berperan sebagai pembuat kebijakan, stakeholder berperan sebagai koordinator (penggerak utama), stakeholder sebagai fasilitator (penyedia), stakeholder berperan sebagai pelaksana (implementer) dan sebagai pendukung (akselerator). Stakeholder yang berperan sebagai pembuat kebijakan yaitu Wali Kota Dumai. Adapun stakeholder yang berperan sebagai koordinator yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Wali Kota Dumai berperan sebagai koordinator antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait. Dalam mitigasi bencana banjir di Kota Dumai, stakeholder yang berperan sebagai fasilitator yaitu ada BPBD, DPU dan DLH. Stakeholder yang berperan sebagai pelaksana dalam mitigasi bencana banjir di Kota Dumai meliputi BPBD, DLH, DPU, Kecamatan, Kelurahan dan RT. Peran stakeholder sebagai pendukung/akselerator dalam mitigasi bencana banjir di Kota Dumai yaitu stakeholder yaitu adanya peran dari PT Kilang Pertamina Unit Dumai, akademisi, sekolah, masyarakat, dan LSM Alam Bahari. Peran stakeholder dalam mitigasi bencana banjir di Kota Dumai berjalan cukup baik, namun masih mengalami beberapa hambatan yang dialami oleh masing-masing stakeholder.

2. Adapun faktor penghambat peran stakeholder dalam mitigasi bencana banjir di Kota Dumai yaitu faktor konflik sosial, lemahnya kemitraan dan keterbatasan anggaran. Akibatnya, peran stakeholder dalam menjalankan program mitigasi bencana banjir di Kota Dumai tidak dapat berjalan maksimal, sehingga upaya pengurangan risiko banjir masih menghadapi banyak hambatan dalam pelaksanaannya.

UCAPAN TERIMA KASIH



Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini, khususnya kepada Wali Kota Dumai, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Dumai, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Dumai, LSM Alam Bahari Hutan Bakau Dumai, PT Kilang Pertamina Internasional RU II Dumai, sekolah SDN 003 Pangkalan Sesai, akademisi Kota Dumai, serta masyarakat terdampak atas waktu, informasi, dan bantuan yang diberikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing dan seluruh responden yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam mitigasi bencana banjir di Dumai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyoso, W. (2018). *Manajemen Bencana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2012). *Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana* (2 ed.). Jakarta Pusat: BNPB.
- Hardoyo, S. R., Sudrajat, & Andri Kurniawan. (2016). *Aspek Sosial Banjir Genangan (ROB) di Kawasan Pesisir* (2 ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harjadi, P., Ratag, M. A., D. K., & Dipl, S. R. (2017). *Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia* (2 ed.). Jakarta Pusat: Direktorat Mitigas.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. (2017). *Modul Metode Pengendalian Banjir*. Bandung.
- Pemerintah Kota Dumai. (2022). *Masterplan Smart City*. Dumai.
- Sandhyavitri, A., M. F., & H. G. (2015). *Mitigasi Bencana Banjir dan Kebakaran*. Pekanbaru: UR Press.
- Sarwono, S. W. (2006). *Teori - Teori Psikologi Sosial* (12 ed.). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sarwono, S. W. (2014). *Teori-Teori Psikologi Sosial* (17 ed.). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sentanu, I. G., Tirani, Y. A., & Syariati, G. A. (2024). *Kolaborasi dan Analisis Stakeholder:Teori, Konsep dan Aplikasi*. Malang: UB Press.
- Siagian, S. P. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sjahruddin, H., I. S., M. F., & S. N. (2023). *Manajemen Komunikasi*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Soekanto, S. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar* (47 ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Solong, N. P., Y. K., & Alhabsyi, N. M. (2022). *Anak Berhadapan Hukum Pembinaan dan Partisipasi Stakeholder*. Sigi: CV.Feniks Muda Sejahtera.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian* (3 ed.). Bandung: Alfabeta.
- Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Press.
- Ulun, M. C., & Veri, N. L. (2020). *Community Empowerment:Teori dan Praktik Pemberdayaan Komunitas*. Malang: UB Press.



- Chandra, D. P. (2021). Pengurangan Risiko Banjir Rob di Kota Dumai. *Skripsi*.
- Desrian Efendi, & Prastiyo, E. B. (2020, Februari). Peran Pemuda Dalam Melestarikan Kesenian Tradisional Alu Di Desa Limau Manis Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna. *Jisipol Raja Haji Tanjungpinang*, 1(2), 121-135.
- Firdausi, F. N., & F. A. (2025, April). Peran Dinas Sosial Provinsi Riau Dalam Peningkatankesejahteraan Lanjut Usia(Studi Kasus UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah di Kota Pekanbaru). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 23(1), 42-52.
- Indra, R. U., R. H., & Kismartini. (2024). Analisis Peran Stakeholders Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Semarang.
- Isa, M., & L. M. (2017). Analisis Stakeholder dalam Pengurangan Risiko Banjir di Kabupaten Klaten. *Urecol*.
- Khoirurrohman, M., D. S., & F. F. (2024). Mitigasi Bencana Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Kota Malang. *Journal of Administration & Development*, 1(2), 67-76 .
- Ningrum, A. S., & Ginting, K. B. (2020, Juni). Strategi Penanganan Banjir Berbasis Mitigasi Bencana Pada Kawasan Rawan Bencana Banjir di Daerah Aliran Sungai Seulaalah Kota Langsa. *GEOSEE*, 1(1).
- Rostati, & L. H. (2021, Mei). Dampak Bencana Banjir Bandang Terhadap Aktivitas Masyarakat Di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. *Pendidikan Sekolah Dasar*, 1(2).
- Soleh. (2022, Februari). Mitigasi Bencana Banjir Melalui Pendekatan Partisipasi Masyarakat Di Wilayah Sungai Citarum Hulu . *Aspirasi*, 12(1).
- Suleman, S. A., & Apsari, N. C. (2017). Peran Stakeholder Dalam Manajemen Bencana. *Riset & PKM*, 4(1).
- Tamitiadi, D., I. A., & Asmara, W. W. (2019). *Komunikasi Bencana:Teori dan Pendekatan Praktis Studi Kebencanaan di Indonesia*. Malang: UB Press.